

ANALISIS PROSES PENGAWASAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2025/2026 TERHADAP KEBIJAKAN JALUR DOMISILI DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh
Putri Nabila
NIM. 2205010017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang. Kebijakan jalur domisili dalam SPMB diterapkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dasar dengan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian daya tampung sekolah dengan jumlah pendaftar, kendala dalam verifikasi data domisili, serta perbedaan jumlah pendaftar antar sekolah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya proses pengawasan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan SPMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan telah diimplementasikan secara prosedural sesuai regulasi daerah, namun belum mencapai efektivitas maksimal pada tataran operasional. Teknik pengendalian (*directing*) dan pengawasan (*controlling*) telah berjalan melalui penetapan juknis dan pelaksanaan bimbingan teknis. Namun, pemantauan (*monitoring*) masih bersifat reaktif karena sangat bergantung pada pengaduan masyarakat. Evaluasi mengungkap adanya kesenjangan validitas dokumen kependudukan, sementara audit dari Inspektorat menemukan ketimpangan distribusi siswa, di mana beberapa sekolah mengalami kelebihan rombongan belajar (*over rombel*) dan sekolah lain kekurangan murid. Supervisi (pengawasan melekat) berhasil mencegah praktik pungutan liar. Penilaian (*appraisal*) kinerja pelaksana cenderung dilakukan secara informal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan sinkronisasi data antarinstansi dan transparansi kuota penerimaan siswa di sekolah dasar sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan SPMB yang lebih adil dan akuntabel.

Kata kunci: Proses pengawasan, SPMB, Sekolah Dasar, Jalur domisili, Kota Tanjungpinang

**ANALYSIS OF THE SUPERVISION PROCESS OF THE ELEMENTARY
SCHOOL NEW STUDENT ADMISSION SYSTEM FOR THE 2025/2026
ACADEMIC YEAR TOWARD THE DOMICILE-BASED ADMISSION
POLICY IN TANJUNGPINANG CITY**

By
Putri Nabila
NIM: 2205010017

ABSTRACT

This research aims to analyze the supervision process of the Elementary School Student Admission System (SPMB) for the 2025/2026 Academic Year regarding the domicile pathway policy in Tanjungpinang. The domicile pathway policy in SPMB is implemented to achieve equitable access to basic education by prioritizing prospective students who reside near the school. However, in its implementation, several obstacles were still found, such as the mismatch between school capacity and the number of applicants, difficulties in verifying domicile data, and differences in the number of applicants among schools. These conditions indicate the importance of the supervision process to ensure that policy implementation runs in accordance with regulations. This study uses a qualitative approach with a descriptive method focusing on the supervision mechanism in the implementation of SPMB. The results show that the supervision process has been implemented procedurally in accordance with regional regulations, but has not yet achieved maximum effectiveness at the operational level. Directing and controlling techniques have been carried out through the establishment of technical guidelines and the implementation of technical guidance. However, monitoring is still reactive because it heavily depends on public complaints. Evaluation revealed discrepancies in the validity of population administration documents, while audits conducted by the Inspectorate found inequalities in student distribution, where some schools experienced excess study groups (over rombongan belajar) while others lacked students. Supervision (attached supervision) succeeded in preventing illegal levies. Meanwhile, the appraisal of implementers' performance tends to be conducted informally. The study concludes that strengthening data synchronization among agencies and increasing transparency in student admission quotas at elementary schools are urgently needed to ensure a fairer and more accountable implementation of SPMB.

Keywords: Supervision process, SPMB, Elementary School, Domicile pathway, Tanjungpinang